

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

KOLABORASI CAMAT DENGAN DANRAMIL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TAHUN 2025 DI KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN OKU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. Arif Rizki¹
Wawan Gunawan²
Rira Nuradhawati³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi :

Abstract

This research analyzes the collaborative governance between sub-district heads (Camat) and military commanders (Danramil) in implementing the Free Nutritious Meal Program in Martapura District, Ogan Komering Ulu Timur Regency, South Sumatra Province. Using Emerson, Nabatchi, and Balogh's (2012) collaborative governance framework, the study explores four dimensions: drivers of collaboration, principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action. The research employs a qualitative descriptive method with data obtained through interviews, observation, and documentation from civil and military officials as well as community representatives. The findings indicate that collaboration between civil and military sectors has contributed positively to the program's implementation, ensuring equitable food distribution, improved nutritional access, and community participation. However, challenges remain, particularly in resource management, coordination frequency, and communication flow between sectors. The study concludes that collaboration is most effective when based on mutual trust, leadership synergy, and institutional support. This research provides theoretical reinforcement for collaborative governance in local administration and practical insights into strengthening civil–military partnerships in social welfare programs.

Keywords: *collaborative governance, civil–military cooperation, nutritious meal program, local government, community welfare*

PENDAHULUAN

Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) merupakan salah satu prioritas nasional yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi dan kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berupaya menyediakan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan di daerah tertinggal. Salah satu daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan program ini adalah Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki karakteristik wilayah agraris dengan tingkat kemiskinan dan kerentanan gizi yang cukup tinggi.

Pelaksanaan program ini menuntut kolaborasi lintas sektor, mengingat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Di tingkat lokal, Camat sebagai representasi pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pengawasan program. Di sisi lain, Danramil sebagai perwira TNI AD yang bertugas di wilayah kecamatan turut berperan dalam membantu pelaksanaan lapangan, pengawasan distribusi, dan membangun kesadaran masyarakat. Keterpaduan peran keduanya menjadi penting, terutama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas program di lapangan.

Fenomena yang ditemukan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PMBG, sinergi antara Camat dan Danramil tidak selalu berjalan optimal. Perbedaan pendekatan birokrasi dan disiplin militer sering kali menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan teknis, terutama terkait pembagian tanggung jawab dan pelaporan kegiatan. Namun, di sisi lain, koordinasi yang baik telah menghasilkan pencapaian yang signifikan dalam efisiensi pendistribusian makanan bergizi kepada masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana bentuk kolaborasi antara Camat dan Danramil dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025 di Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses kolaborasi sipil–militer di tingkat lokal dalam mendukung kebijakan sosial pemerintah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kolaborasi tersebut.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Pendekatan ini relevan karena menekankan pentingnya sinergi antaraktor dari berbagai sektor untuk mencapai tujuan publik bersama. Kolaborasi tidak hanya diukur dari kesepakatan formal, tetapi juga dari engagement, kepercayaan, motivasi bersama, dan kapasitas kolektif yang terbangun selama implementasi program.

Penelitian ini penting secara akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai kolaborasi sipil–militer dalam konteks pemerintahan lokal, yang masih jarang dikaji secara empiris di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan aparat TNI AD dalam membangun model kerja sama lintas sektoral yang berkelanjutan dalam pelaksanaan kebijakan sosial di masa depan.

Kerangka Teori

Teori Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mendefinisikan kolaborasi sebagai proses di mana aktor-aktor publik dan nonpublik bekerja secara kolektif dalam forum formal untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara individu. Model ini menekankan bahwa kolaborasi harus bersifat partisipatif, berbasis kepercayaan, dan terarah pada penciptaan nilai publik. Emerson membagi proses kolaboratif ke dalam empat dimensi utama: drivers of collaboration, principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action.

Dimensi pertama, drivers of collaboration, menyoroti faktor pendorong yang membuat berbagai pihak terdorong untuk bekerja sama, seperti tekanan eksternal, urgensi masalah, atau kepemimpinan yang kuat. Kedua, principled engagement menggambarkan bagaimana para aktor membangun forum interaksi, berbagi pandangan, dan mencapai kesepakatan. Ketiga, shared motivation mencakup aspek kepercayaan, komitmen, dan rasa saling menghargai yang menjadi dasar hubungan kerja kolaboratif.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Keempat, capacity for joint action mengacu pada kemampuan kolektif lembaga dalam mengimplementasikan kesepakatan, mencakup sumber daya, prosedur, dan koordinasi yang berkelanjutan.

Kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis kolaborasi antara Camat dan Danramil dalam implementasi PMBG di Martapura. Dengan menggunakan keempat dimensi tersebut, penelitian ini mengungkap sejauh mana kolaborasi sipil–militer di tingkat kecamatan berjalan efektif dan berkontribusi terhadap keberhasilan program sosial pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi antaraktor di tingkat lokal. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Camat Martapura, Danramil 403-08 Martapura, staf kecamatan, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat program PMBG. Data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah, laporan pelaksanaan program, dan arsip kegiatan koordinasi lintas sektor.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, sementara interpretasi dilakukan dengan memadukan teori kolaborasi dan data empiris dari lapangan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan temuan empiris di setiap dimensi teori.

PEMBAHASAN

Kecamatan Martapura merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah sekitar 264,6 km² dan jumlah penduduk mencapai 68.000 jiwa pada tahun 2024.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani padi, palawija, dan perkebunan rakyat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat relatif menengah ke bawah, dengan tingkat kemiskinan mencapai 12,7% menurut data BPS Kabupaten OKU Timur (2024). Dari sisi kesehatan, Kecamatan Martapura menjadi salah satu dari lima wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di kabupaten, yaitu sebesar 23,8%. Kondisi ini menjadikan wilayah Martapura sebagai prioritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) tahun 2025, yang difokuskan pada penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah dasar, ibu hamil, dan kelompok rawan gizi.

Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak lintas sektor, antara lain Camat Martapura sebagai koordinator wilayah administratif, Danramil 403-08 Martapura sebagai pelaksana pendamping lapangan, dinas kesehatan, serta perangkat desa. Dalam implementasinya, program ini membutuhkan distribusi logistik harian, pengawasan kualitas makanan, serta pelaporan akuntabel ke tingkat kabupaten. Di sinilah peran kolaboratif antara Camat dan Danramil menjadi strategis — keduanya berperan sebagai penggerak utama dan penjamin keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Sinergi sipil-militer dalam konteks ini mencerminkan implementasi nyata prinsip collaborative governance di tingkat lokal.

1. Drivers of Collaboration

Dimensi drivers of collaboration menggambarkan faktor-faktor pendorong yang melahirkan kolaborasi antarinstansi. Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi antara Camat Martapura dan Danramil 403-08 berawal dari kesadaran akan urgensi masalah gizi di masyarakat. Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang percepatan penurunan stunting menjadi pemicu utama kerja sama ini. Tekanan eksternal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk membangun sinergi lintas lembaga, termasuk dengan unsur TNI, guna mempercepat distribusi dan pengawasan pelaksanaan program.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Selain faktor regulatif, terdapat pula pendorong internal berupa hubungan interpersonal yang kuat antara Camat dan Danramil. Keduanya memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya tanggung jawab sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam wawancara, Camat Martapura menyebutkan bahwa peran Danramil sangat vital dalam mendukung pendistribusian makanan ke desa-desa terpencil, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh tenaga sipil. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif dan rasa tanggung jawab moral menjadi internal drivers yang menggerakkan kerja sama lintas institusi.

Secara analitis, kolaborasi ini lahir karena adanya kesamaan tujuan dan kepentingan publik. Dalam kerangka teori Emerson, pendorong kolaborasi terbentuk dari kombinasi tekanan eksternal dan komitmen internal yang berorientasi pada nilai bersama. Dalam konteks Martapura, keberhasilan koordinasi awal program PMBG menjadi bukti bahwa kesamaan visi antaraktor berperan besar dalam membangun kolaborasi yang solid sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Dengan demikian, drivers of collaboration di Martapura bersifat ganda — terdiri atas faktor kebijakan nasional sebagai tekanan eksternal dan kepemimpinan lokal sebagai motivasi internal. Keduanya membentuk landasan moral dan struktural yang mendorong terjadinya kerja sama efektif antara unsur sipil dan militer dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Principled Engagement

Dimensi principled engagement menyoroti proses interaksi dan keterlibatan para pihak yang berkolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk keterlibatan antara Camat dan Danramil dalam pelaksanaan PMBG tercermin dalam berbagai forum formal seperti rapat koordinasi mingguan, evaluasi bulanan, serta monitoring lapangan bersama. Forum ini dihadiri oleh perangkat

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

desa, kepala sekolah, kader PKK, serta Babinsa yang bertugas di wilayah kerja masing-masing. Dalam forum tersebut, seluruh pihak berdiskusi mengenai kendala, efektivitas distribusi, serta kualitas makanan yang diterima oleh masyarakat.

Proses principled engagement ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga membangun komunikasi dua arah. Dalam wawancara dengan Danramil, ia menegaskan bahwa pelibatan unsur militer bukan untuk mengambil alih kewenangan sipil, tetapi untuk memperkuat pengawasan dan menjaga kedisiplinan pelaksanaan program. Di sisi lain, Camat memastikan bahwa seluruh keputusan tetap berada dalam koridor pemerintahan daerah, sehingga keseimbangan peran tetap terjaga. Sinergi ini membentuk mekanisme kerja sama yang menghargai prinsip kesetaraan dan saling menghormati antarinstansi.

Analisis teori Emerson menunjukkan bahwa principled engagement hanya dapat terbentuk apabila ada kejelasan aturan main, keterbukaan komunikasi, dan kesediaan untuk berbagi informasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Camat dan Danramil sama-sama berkomitmen menjaga transparansi pelaporan dan pelibatan masyarakat dalam evaluasi program. Hal ini memperkuat legitimasi kolaborasi serta memperluas dukungan sosial terhadap pelaksanaan program PMBG di Martapura.

Dengan demikian, principled engagement di Martapura berhasil menciptakan ruang dialog yang sehat antara unsur sipil dan militer. Prinsip keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama menjadi pondasi kuat dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan.

3. Shared Motivation

Dimensi shared motivation mencakup unsur kepercayaan, komitmen, dan rasa saling menghargai di antara pihak-pihak yang berkolaborasi. Berdasarkan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

hasil penelitian, hubungan antara Camat dan Danramil di Martapura ditandai dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan ini terbentuk melalui interaksi intensif dan pengalaman kerja sama dalam berbagai program pemerintahan sebelumnya, seperti penanggulangan bencana dan pengamanan pemilu. Hubungan profesional yang sudah terbangun dengan baik menjadi modal sosial yang memperkuat kerja sama di lapangan.

Selain itu, motivasi bersama untuk melayani masyarakat menjadi pengikat moral kolaborasi ini. Camat Martapura dalam wawancara menegaskan bahwa tujuan utama mereka bukan hanya menjalankan program, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Danramil menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk pengabdian TNI AD kepada rakyat di luar fungsi pertahanan. Sinergi tersebut menciptakan rasa saling menghormati antara aktor sipil dan militer, sehingga potensi konflik kepentingan dapat diminimalisasi.

Dalam kerangka teori Emerson, *shared motivation* adalah hasil dari interaksi dan keterlibatan yang konsisten. Di Martapura, proses ini tampak melalui komitmen bersama menjaga integritas dan keberlanjutan program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan kultur birokrasi dan disiplin organisasi, keduanya mampu membangun hubungan kerja yang harmonis karena dilandasi nilai bersama — yaitu pelayanan publik dan kepedulian sosial.

Dengan demikian, *shared motivation* antara Camat dan Danramil bukan hanya terbentuk dari kebutuhan administratif, melainkan juga dari ikatan nilai kemanusiaan dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Hal ini menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan kolaborasi lintas sektor di tingkat lokal.

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 12 Okt 2025

Published : 23 Okt 2025

4. Capacity for Joint Action

Dimensi terakhir, *capacity for joint action*, menggambarkan kemampuan kolektif lembaga yang berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan bersama. Berdasarkan temuan penelitian, Camat dan Danramil di Martapura berhasil membangun kapasitas kolaboratif melalui pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi. Camat memimpin aspek administratif dan kebijakan lokal, sementara Danramil fokus pada logistik dan pengawasan lapangan. Dukungan dari Babinsa di setiap desa memperkuat fungsi distribusi dan kontrol, sehingga proses pendistribusian makanan dapat menjangkau seluruh sasaran tepat waktu.

Namun, kendala masih muncul pada aspek sumber daya manusia dan pendanaan. Beberapa petugas lapangan mengaku belum mendapatkan pelatihan teknis terkait pengelolaan makanan bergizi, dan alokasi anggaran kecamatan untuk mendukung kegiatan koordinasi masih terbatas. Meski demikian, Danramil sering kali memanfaatkan sumber daya internal TNI untuk membantu mobilisasi logistik dan pengawasan di daerah sulit dijangkau. Langkah-langkah adaptif ini menunjukkan kapasitas kolaboratif yang tinggi dari kedua belah pihak dalam mengatasi keterbatasan sumber daya.

Dalam kerangka teori Emerson, kapasitas kolaboratif melibatkan aspek prosedural, struktural, dan interpersonal. Penelitian ini menemukan bahwa keempat unsur tersebut telah terpenuhi dalam konteks Martapura. Adanya *standard operating procedure (SOP)* sederhana, kepemimpinan partisipatif, dan keterlibatan masyarakat menjadikan kolaborasi ini tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan.

Dengan demikian, *capacity for joint action* di Martapura menggambarkan tingkat kematangan kolaborasi antara Camat dan Danramil. Meski masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, kemampuan adaptasi dan sinergi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

antarinstansi telah membuktikan bahwa kerja sama sipil–militer dapat menjadi model koordinasi efektif dalam pelaksanaan program sosial di daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Camat Martapura dan Danramil 403-08 Martapura dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) Tahun 2025 merupakan bentuk praktik nyata dari penerapan Collaborative Governance di tingkat pemerintahan lokal. Kolaborasi ini didorong oleh kesadaran bersama terhadap pentingnya penanggulangan gizi buruk dan stunting di wilayah OKU Timur yang memiliki angka prevalensi cukup tinggi. Hubungan sinergis antara unsur sipil dan militer terbukti mampu memperkuat implementasi program pemerintah melalui koordinasi lintas sektor, pembagian tugas yang efisien, dan pengawasan lapangan yang lebih efektif.

Berdasarkan analisis terhadap empat dimensi teori Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), ditemukan bahwa kolaborasi di Martapura berjalan cukup baik. Dimensi *drivers of collaboration* menunjukkan bahwa sinergi ini lahir dari perpaduan antara dorongan kebijakan nasional dan kepemimpinan lokal yang kuat. Dimensi *principled engagement* menggambarkan keterlibatan aktif semua pihak melalui forum komunikasi dan koordinasi yang transparan. Pada dimensi *shared motivation*, terbentuk hubungan kerja berbasis kepercayaan, komitmen, dan rasa tanggung jawab sosial antara Camat dan Danramil. Sedangkan dimensi *capacity for joint action* memperlihatkan kemampuan adaptif kedua pihak dalam mengelola sumber daya terbatas dan membangun sistem kerja kolektif yang terkoordinasi.

Dari seluruh hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Camat dan Danramil dalam program PMBG tidak hanya berhasil meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sosial, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan TNI AD. Kolaborasi sipil–militer yang harmonis ini menjadi model kerja sama lintas sektor yang relevan untuk diterapkan dalam berbagai program

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

kesejahteraan masyarakat lainnya di Indonesia, terutama di daerah dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi yang menantang.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk memperkuat keberlanjutan kolaborasi antara unsur pemerintahan sipil dan militer di tingkat lokal. Pertama, pemerintah daerah perlu menetapkan regulasi atau pedoman khusus tentang kolaborasi sipil–militer dalam pelaksanaan program sosial agar terdapat kejelasan tugas, kewenangan, serta mekanisme pelaporan yang terstandar. Kedua, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan terpadu yang melibatkan unsur kecamatan, Koramil, dan perangkat desa, sehingga koordinasi lapangan dapat berjalan lebih efisien dan profesional.

Ketiga, untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran kolaboratif lintas instansi guna menjamin tersedianya sarana transportasi, logistik, dan pengawasan. Keempat, perlu dikembangkan sistem monitoring digital terpadu antara kecamatan dan Koramil untuk mempercepat pelaporan dan pengawasan di lapangan secara real time. Terakhir, penting bagi para pemimpin di tingkat lokal untuk menanamkan nilai-nilai kolaborasi dan pelayanan publik sebagai bagian dari budaya kerja organisasi, agar kerja sama sipil–militer tidak hanya bersifat situasional, tetapi menjadi sistemik dan berkelanjutan.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan kolaborasi antara Camat dan Danramil dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi model ideal bagi sinergi lintas sektor di daerah lain. Kolaborasi ini bukan sekadar wujud kerja sama teknis, melainkan representasi dari komitmen moral dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Basri, M., & Rahman, F. (2022). Sinergi sipil-militer dalam implementasi kebijakan sosial: Studi kasus program ketahanan pangan di daerah terpencil. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 141–159. <https://doi.org/10.25077/jian.v9i2.2022>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2020). *Manajemen pelayanan publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Haryanto, S., & Kurniawan, D. (2023). Collaborative governance in rural development: The role of inter-agency partnerships. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 11(1), 88–107. <https://doi.org/10.33021/jkap.v11i1.2023>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024). *Laporan nasional program percepatan penurunan stunting dan makan bergizi gratis*. Jakarta: Kemenko PMK RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mulyadi, R., & Prasetyo, W. (2023). Peran pemerintah daerah dalam penguatan kolaborasi lintas sektor untuk program gizi masyarakat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(3), 67–85. <https://doi.org/10.23960/jakp.v10i3.2023>
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Dinamika kebijakan publik di era kolaboratif*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. (2024). *Laporan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2024*. Martapura: Sekretariat Daerah OKU Timur.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2020). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

-
- Rahman, I., & Fauziah, L. (2022). Strengthening interagency collaboration in social welfare programs: Lessons from local governance in Indonesia. *Public Policy and Management Review*, 8(2), 113–131. <https://doi.org/10.1080/ppmrv.2022.8.2.113>
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suharto, E., & Nurhidayati, A. (2023). Governance and collaboration in social protection programs: The Indonesian experience. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 8(1), 45–63. <https://doi.org/10.31227/jks.v8i1.2023>
- Subarsono, A. G. (2020). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukmawati, D., & Andriani, N. (2024). Sinergi pemerintah daerah dan TNI dalam pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 188–206. <https://doi.org/10.33172/jip.v12i2.2024>
- Wibisono, H., & Pratama, B. (2021). Collaborative implementation of community nutrition improvement policy in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 221–238. <https://doi.org/10.33021/jap.v9i4.2021>
- Yuliana, N., & Rahardjo, P. (2024). Evaluating intersectoral collaboration in stunting reduction policy. *Jurnal Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 12(1), 31–49. <https://doi.org/10.32121/japd.v12i1.2024>